Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional
Vol. 3 No. 1, Juli 2023, Hal 48-57
ISSN 2828-1853 (Online)

Pendekatan *Hotspot* Sebagai Upaya Penanganan Krisis pengungsi Di Yunani Tahun 2015-2016

Kadek Riana Indrayanti[1)] , Ni Wayan Rainy Priadarsini[2)] , Penny Kurnia Putri[3)]

[1,2,3)] Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi *hotspot* oleh Yunani dalam mengatasi krisis pengungsi yang menjadi ancaman keamanan regional Eropa. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada konsep *policy* dan *refugee* serta teori keamanan regional. Dalam penelitian ini menemukan bahwa penerapan *hotspot* di Yunani berfungsi untuk mendeteksi maksud dan tujuan para pengungsi yang hendak pergi ke Eropa. Jika mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Eropa, para pengungsi akan melalui tahap pengembalian. Sedangkan yang layak untuk tinggal maka akan melanjutkan proses relokasi ke negara Eropa lainnya. Dengan demikian, keamanan regional di Eropa akan terjaga dari ancaman kedatangan pengungsi di negaranya dengan mengimplementasikan *hotspot* di Yunani karena posisinya sebagai gerbang masuk utama bagi pengungsi ke Eropa.

Kata-kunci : *Hotspot,* Keamanan Regional, Pengungsi, Yunani

Abstract

This study aims to see how the implementation of the European Union hotspot by Greece in solve the refugee crisis. The refugee crisis has become a threat that will affect to regional security. Therefore, this study refers to the concept of policy and refugees and regional security theory. This research found that the hotspot implementation in Greece served to detect the purposes and intentions of refugees who wanted to go to Europe. If they were not eligible to stay in Europe, they would risk a return. Meanwhile, refugees who were said to be eligible to stay, would proceed to the relocation process to go to another European country. Thus, the regional security in Europe would be protected from the threat of the refugees arrivals in their countries by using Greece because of Greece's position as the main gateway for refugees to Europe.

Keywords *: Greece, Hotspot, Refugee, Regional Security*

Kontak Penulis
Kadek Riana Indrayanti
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali
Telp: +62 361 255378 Fax: +62 361 255916
E-mail: rianaindrayanti29@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan sekelompok orang yang berupaya untuk mencari perlindungan ke negara tetangga akibat kondisi di negara asalnya yang dirasa tidak aman. Para pengungsi dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 yang membahas mengenai hak-hak para pengungsi yang wajib dipenuhi oleh negara penerima (Unhcr, 1967). Tentunya penanganan pengungsi di tiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi yang dialami negara tersebut. Jumlah pengungsi di dunia terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 terjadi krisis pengungsi di negara-negara Eropa akibat adanya konflik di negara-negara Timur Tengah (UNHCR, n.d.). Konflik di negara-negara Timur Tengah diawali oleh adanya peristiwa Arab Spring tahun 2010 yang mana peristiwa ini justru menimbulkan adanya konflik berkepanjangan (Ridho et al., 2020).

Yunani menjadi salah satu negara yang menderita akibat dari banyaknya jumlah kedatangan pengungsi dinegaranya. Awalnya Yunani memang diperuntukkan sebagai negara transit karena posisi Yunani yang merupakan gerbang masuk para pengungsi untuk menuju Eropa namun ditahun tersebut Yunani justru mengalami krisis pengungsi (Skleparis, n.d.). Tentunya krisis pengungsi ini memicu timbulnya permasalahan baru di Yunani yang mana kondisi ini bersamaan dengan adanya krisis ekonomi di Yunani yang tidak kunjung usai sejak tahun 2009 (Anagnostopoulos et al., 2017).

Adanya krisis pengungsi di Yunani tentunya memerlukan penanganan karena Yunani di tahun tersebut berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk terus dapat menerima kedatangan pengungsi di negaranya. Selain itu, muncul beberapa kekecewaan dari negara-negara Eropa lainnya yang secara tegas menyatakan bahwa mereka menolak adanya kedatangan pengungsi di negaranya sehingga situasi ini membuat para pengungsi menjadi menumpuk di Yunani (Petersen, 2019). Kondisi ini juga memberikan situasi yang dilematis bagi Yunani karena adanya kebijakan atau instrument yang membuat Yunani harus menerima dan memperlakukan pengungsi dengan baik walaupun dengan keterbasatan sistem dan sumber daya di negaranya (Petersen, 2019).

Krisis pengungsi yang terjadi di Yunani tentunya dilaksanakan bersama dengan Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Eropa. Uni Eropa di tahun terjadinya krisis pengungsi mencetuskan kebijakan sebagai bentuk respon utama dan menunjukkan adanya dukungan yaitu melalui pendekatan *hotspot* yang merupakan bagian dari agenda migrasi Uni Eropa (Abikova & Piotrowicz, 2021). Penerapan *hotspot* akan berfokus di negara garis depan seperti Yunani dan Italia yang memfasilitas penerimaan awal, identifikasi, pendaftaran dan pengambilan sidik jari bagi para migran, pengungsi atau para pencari suaka (Mentzelopoulou & Luyten, 2018).

Kebijakan *hotspot* diimplementasi di lima pulau Yunani yaitu pulau Chios, Kos, Leros, Lesbos dan Samos (Abikova & Piotrowicz, 2021). Terdapat beberapa tahapan yang akan dijalankan bagi para pengungsi yang hendak memperoleh perlindungan internasional yang nantinya akan mencapai hasil keputusan yang berbeda. *Hotspot* di Yunani berkaitan erat dengan adanya kebijakan bekerja sama antara Turki dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk membendung arus pengungsi yang hendak menuju ke Eropa. Kebijakan kerja sama tersebut dikenal dengan sebutan *EU-Turkey Statement* (Mentzelopoulou & Luyten, 2018).

Kebijakan kerja sama Uni Eropa dengan Turki ini dikatakan sangat memengaruhi dan membantu penerapan *hotspot* di Yunani yang membuat kondisi negara tersebut menjadi lebih teroganisir. Kebijakan *hotspot* tentunya menjadi tempat yang akan meminimalisir munculnya ancaman dari kedatangan pengungsi di Eropa karena sering kali para pengungsi ditemukan mempergunakan akses illegal untuk masuk ke

Eropa dan beberapa ancaman kejahatan lainnya (Mentzelopoulou & Luyten, 2018). Sehingga, melalui penerapan kebijakan *hotspot* di Yunani yang merupakan negara gerbang masuk utama bagi para pengungsi akan meminimalisir potensi ancaman dari pengungsi dan tentunya akan menjaga kedaulatan dan kemanan regional Eropa. Kendati demikian, implementasi kebijakan ini tentunya mengalami beberapa tantangan dan kesulitan di Yunani maka melalui tulisan ini, penulis akan melihat bagaimana implementasi kebijakan pendekatan *hotspot* Uni Eropa di Yunani dalam mengatasi krisis pengungsi pada tahun 2015-2016.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga literatur yang membantu tulisan ini. Literatur pertama berjudul *"The Gates of Greece: Refugees and Policy Choices,"* karya Ismini A. Lamb (2016). Dalam tulisan Lamb (2014) memaparkan mengenai negara-negara Eropa termasuk Yunani di tahun 2015 mengalami krisis pengungsi yang mana terdapat beberapa permasalahan yang pada akhirnya mendapat sorotan dari organisasi internasional. Yunani sebagai negara penerima jumlah pengungsi terbanyak menghadapi beberapa tantangan kejahatan sehingga otoritas Yunani berupaya memohon bantuan terhadap Uni Eropa karena krisis merupakan permasalahan bersama. Permohonan bantuan ini tentunya disebabkan oleh adanya kesulitan Yunani saat menghadapi krisis pengungsi yang bersamaan dengan krisis ekonomi. Tulisan ini juga menyatakan bahwa Yunani mendapat kritik akibat adanya penanganan krisis yang lambat sehingga kebutuhan para pengungsi tidak terpenuhi yang mana kondisi ini diakibatkan adanya keterlibatan pemerintah Koalisis Kiri Radikal (Syriza).

Tulisan Lamb (2014) membantu penulis dalam melihat bagaimana situasi krisis pengungsi mengalami respon yang berbeda sehingga membebani negara pinggiran seperti Yunani untuk dapat menghadapi krisis tersebut yang mana tentunya memerlukan bantuan dari Uni Eropa. Namun, tulisan Lamb (2016) tidak menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Uni Eropa di Yunani.

Literatur kedua berjudul *"The Common European Asylum System: Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study,"* karya Nikiforos Petersen (2019). Dalam tulisan Petersen (2019) menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Uni Eropa yang bernama *The Common European Asylum System* (CEAS) di Yunani. Tulisan ini menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Yunani yang justru menyulitkan posisi negara tersebut sebagai negara gerbang masuk pertama bagi para pengungsi. Kebijakan Uni Eropa tersebut memperlihatkan adanya pembagian yang tidak setara dan adil mengenai tanggung jawab dalam menerima pengungsi atau pencari suaka. Dengan adanya kondisi ini justru mengakibatkan kondisi pengungsi di Yunani berada dalam ancaman.

Tulisan Petersen (2019) membantu penulis dalam melihat bagaimana pengaruh dan implementasi kebijakan dari Uni Eropa terhadap negara anggotanya yang justru mendatangkan tantangan tambahan khususnya bagi Yunani. Namun, tulisan ini tidak menjelaskan bagaimana ancaman yang muncul dari adanya arus migrasi dan pengungsi di Uni Eropa yang mana sering kali pengungsi atau migran dianggap dapbat menjadi ancaman dari kemanan nasional negara penerima.

Literatur ketiga berjudul "*Migration Crisis in the EU: Developing A Framework For Analysis Of National Security And Defence Strategies,"* karya João Estevens (2018). Dalam Tulisan Estevens (2018) memaparkan mengenai perbandingan strategi pertahanan serta keamanan nasional dari negara-negara di Eropa saat menghadapi krisis pengungsi. Kedatangan pengungsi di Eropa memang telah dianggap membawa dampak ancaman bagi keamanan nasional negara tersebut termasuk di Yunani. Posisi Yunani menjadi faktor yang paling memengaruhi timbulnya ancaman yang lebih besar sehingga

akan sangat memengaruhi kondisi keamanan di negaranya. Tulisan Estevens (2018) membantu penulis untuk melihat bagaimana strategi pertahanan dan keamanan nasional dari negara-negara Eropa dalam menghadapi krisis migrasi. Namun dalam Tulisan ini tidak menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam menjaga keamanan regional di Eropa saat terjadinya krisis pengungsi tahun 2015. Melalui penelitian ini berupaya untuk dapat mengambarkan atau mengulas mengenai implementasi *hotspot* Uni Eropa di Yunani dalam mengatasi krisis pengungsi pada tahun 2015-2016 dengan maksud untuk menjaga keamanan regional Eropa dari ancaman kedatangan pengungsi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan sumber data sekunder dan disajikan dalam bentuk narasi, gambar serta grafik. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang akan diorganisasikan, dikelompokkan dan disusun sesuai masing-masing bahasan. Penggunaan level analisis pada penelitian ini yaitu sistem internasional dengan unit analisis negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Letak Geografis Terhadap Krisis Pengungsi di Yunani

Yunani atau yang disebut dengan Republik Hellenic merupakan negara yang terletak di bagian Tenggara dari Benua Eropa (Clogg et al., 2022). Yunani dipenuhi oleh pegunungan dan perbukitan dengan luas wilayah seluas 132.049 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 10,678,632 Jiwa (European Union, n.d.). Disekeliling Yunani berbatasan dengan (Clogg et al., 2022): Sebelah Utara (Albania, Bulgaria, dan Republik Makedonia), Sebelah Timur (Turki dan Laut Aegean), Sebelah Selatan (Laut Tengah atau Mediterania), Sebelah Barat (Laut Lonia).

Letak geografis dari Yunani sangat memengaruhi kondisi perkembangan dari negara tersebut. Yunani yang juga merupakan salah satu negara anggota dari Uni Eropa menjadi negara gerbang masuk pertama bagi para pengungsi atau migran yang hendak menuju Eropa (Satria Mulyadi et al., 2020). Dengan beberapa faktor letak serta posisi Yunani tersebut menjadikan Yunani di tahun 2015 menerima jumlah kedatangan pengungsi yang banyak dan tentu berbeda dengan apa yang dialami negara Eropa lainnya (Lamb, 2016).

Bagi para pengungsi, posisi Yunani merupakan wilayah yang sangat strategis dan mudah dicapai para pengungsi dimana terdapat dua rute jalur yang dapat dilalui yaitu rute jalur laut dan rute jalur darat. Berdasarkan batas- batas yang berada di sekeliling Yunani, Laut Aegean dan Laut Mediterania menjadi rute yang paling sering dilalui karena rute ini memiliki jarak yang pendek walaupun cukup membahayakan (Herindrasti, 2015). Pernyataan tersebut di dukung oleh data dari *The United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (2016) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Yunani menerima jumlah kedatangan pengungsi melalui jalur laut sebanyak 856,723 Jiwa yang mana kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang dialami Italia dan Spanyol yang juga merupakan negara pinggiran Eropa. Mengenai persentase kebangsaan para pengungsi yang tiba di Yunani karena krisis disebabkan oleh adanya konflik di Timur Tengah maka para pengungsi di dominasi oleh pengungsi yang berasal dari negara tersebut seperti Suriah, Iraq dll (UNHCR, 2016).

Kebijakan *Hotspot* Sebagai Respon Kemunculan Krisis Pengungsi

Kedatangan pengungsi di Eropa mengalami tanggapan beragam akibat adanya beberapa perspektif negatif yang ditujukan kepada pengungsi. Berdasarkan data dari Richard Wike, Bruce Stokes dan Katie Simmons dalam tulisannya yang berjudul "*Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs"* (2016) menjelaskan bahwa negara-negara Eropa menghadapi kekhawatiran akan keamanan serta ekonomi mereka saat adanya krisis pengungsi. Data tersebut menampilkan

bahwa kekhawatiran tersebut berupa pengungsi yang dianggap akan meningkatkan kemungkinan terorisme, pengungsi merupakan beban bagi negara karena mereka mengambil pekerjaan dan manfaat sosial, dan pengungsi menjadi kelompok yang lebih disalahkan atas kejahatan daripada kelompok lain. Berdasarkan data tersebut kekhwatiran yang dialami menunjukkan persentase yang cukup tinggi.

Kekhawatiran yang menganggu negara-negara Eropa tentunya berdasarkan adanya ancaman yang dapat memengaruhi keamanan regional Eropa. Berdasarkan penjabaran dari Paul D. Williams (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa dampak ancaman yang berpotensi timbul saat adanya kedatangan pengungsi yang mana dampak ancaman tersebut beberapa ditemukan di Eropa termasuk Yunani berdasarkan data dari Wike et al. (2016) dan data-data lainnya. Ancaman tersebut berupa beban besar terhadap perekonomian, berpotensi terjadinya konflik etnis, munculnya permasalahan kesehatan, membawa perubahan pada stabilitas negara akibat kemungkinan munculnya terorisme. Berdasarkan beberapa dampak dari kedatangan pengungsi tersebut tentunya menjadikan kondisi keamanan Eropa menjadi terancam. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, Uni Eropa berupaya mengatasi permasalahan bersama dengan menerapkan kebijakan *hotspot.*

Kebijakan *hotspot* merupakan bagian dari Agenda Eropa terkait migrasi dengan tujuan untuk membentuk tindakan solidaritas serta tindakan sementara dari negara-negara anggota saat menghadapi tekanan migrasi (Komisi Eropa dalam Guérin, 2021). *Hotspot* menjadi sarana yang memfasilitasi registrasi dan identifikasi dari pengungsi yang mana penerapan *hotspot* memang difokuskan di negara garis depan Eropa seperti Yunani dan Italia (Mentzelopoulou & Luyten, 2018). Penerapan *hotspot* di negara garis depan Eropa tentunya menjadi upaya menciptakan kondisi krisis pengungsi yang lebih terkoordinasi dan diupayakan untuk meminimalisir dampak ancaman yang ditimbulkan dari kedatangan pengungsi (Danish Refugee Council, 2017).

Pelaksanaan *hotspot* menawarkan dua hasil keputusan saat seluruh tahapan prosedur penerimaan serta pendaftaran telah dijalankan oleh pengungsi. Dimana hasil keputusan tersebut diantaranya : relokasi dan pengembalian. Kondisi *hotspot* di Yunani khususnya sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan kerja sama yang dijalankan oleh Uni Eropa dengan Turki yang disebut *EU-Turkey Statement* dan seluruh tahapan dilaksanakan otoritas nasional bersama dengan badan atau lembaga dari Uni Eropa dengan tugas yang berkaitan satu sama lain (Danish Refugee Council, 2017).

Implementasi *Hotspot* di Yunani dalam Mengatasi Krisis Pengungsi

Yunani menjadi salah satu negara yang mengalami kondisi paling parah di tahun 2015 sehingga memerlukan adanya penanganan segera. Kondisi yang terjadi di Yunani tersebut disebabkan oleh letak geografis Yunani dan Yunani yang merupakan negara gerbang masuk pertama bagi para pengungsi untuk menuju ke Eropa (Lamb, 2016). Kedatangan para pengungsi di Yunani dan Eropa tentunya dengan harapan untuk mendapati perlindungan internasional dan mendapati kehidupan yang lebih baik.

Kebijakan *hotspot* dari Uni Eropa menjadi salah satu kebijakan yang diimplementasikan di Yunani sebagai upaya penanganan krisis pengungsi yang terjadi di negara-negara Eropa (etiasvisa, n.d.). Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Eropa memiliki kedudukan dan wewenang yang sangat memengaruhi kondisi di negara anggotanya seperti adanya pengaruh hukum yang bersifat mengikat dan negara anggota memiliki kewajiban untuk diimplementasikan dan diterapkan kedalam kebijakan nasional negara mereka (Gabel, 2022). Sehingga, dengan adanya pengaruh Uni Eropa tersebut membuat posisi Yunani berada dalam keadaan yang rumit dengan banyaknya tekanan kondisi di negaranya seperti adanya krisis ekonomi yang bersamaan dengan krisis pengungsi.

Kebijakan *hotspot* yang dicetuskan Uni Eropa untuk diimplementasikan di negara anggota tentunya telah berdasarkan kesepakatan perjanjian dan menjadi syarat keaangotaan. Negara saat bergabung kedalam Uni Eropa memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan yurisdiksi akhir kepada Pengadilan Eropa yang mana keputusan dari Uni Eropa harus dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persoalan (European commission, 2020). *Hotspot* yang merupakan respon utama dari Uni Eropa yang dicetuskan saat negara Eropa mengatasi permasalahan bersama yaitu krisis pengungsi.

Tentunya terdapat tantangan yang dihadapi oleh negara anggota yaitu Yunani saat mengimplementasi kebijakan *hotspot* ini karena Yunani merupakan salah satu dari dua negara yang dipilih Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan bersama yaitu krisis pengungsi. Tidak menjadi suatu yang mengherankan saat suatu negara menghadapi beberapa kesulitan saat menerapkan kebijakan dari sebuah organisasi karena dari adanya kondisi ini akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap negara anggota termasuk Yunani saat berupaya mengimplementasikan kebijakan dari Uni Eropa yang mana bertujuan untuk menjadi sarana menjaga keamanan regional di Eropa. Walaupun demikian, Yunani harus mengimplementasikan kebijakan tersebut namun wewenang untuk pelaksanaanya tetap menjadi milik Yunani (European commission, 2020). Sehingga, terdapat beberapa perbedaan implementasi kebijakan *hotspot* di Yunani dan Italia bergantung pada bagaimana kondisi serta kemampuan dari negara tersebut.

Penerapan *hotspot* di Yunani dibangun di lima pulau dimana pulau Lesvos menjadi pilihan pertama dari Uni Eropa dan Yunani dan dilanjutkan oleh pulau lainnya seperti Chios, Samos, Leros, Kos. Keberadaan *hotspot* tentunya menjadi sarana yang penting mengingat beragamnya kedatangan pengungsi di Yunani sehingga melalui *hotspot* ini para pengungsi akan melalui tahapan registrasi dan identifikasi sehingga setelah melalui tahapan tersebut para pengungsi akan mendapatkan perlindungan dan izin tinggal sementara di Eropa. Kebijakan ini dipastikan oleh Uni Eropa akan tetap mengedepankan hak-hak para pengungsi (Mentzelopoulou & Luyten, 2018).

Kebijakan *hotspot* dari Uni Eropa tidak memiliki kerangka hukum yang benar-benar mengatur namun terdapat kebijakan *The Common European Asylum System* (CEAS) yang membantu dan mengatur kebijakan *hotspot* tersebut. Untuk *hotspot* di Yunani dipantau berdasarkan *Law* 4375/2016 yang telah berlaku sejak April 2016. Kebijakan Yunani tersebut disepakati setelah adanya perjanjian kerja sama antara Uni Eropa dengan Turki di tahun 2016 yang sangat memengaruhi kondisi penerimaan pengungsi di *hotspot*. Kondisi *hotspot* di Yunani dikatakan sangat menarik perhatian karena adaya kepadatan pengungsi yang mengakibatkan munculnya beberapa permasalahan lain seperti adanya ketegangan antara masyarakat Yunani dan pengungsi. Selain itu, muncul juga beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi sehingga menimbulkan kondisi yang tidak aman di Yunani (Mentzelopoulou & Luyten, 2018).

Tahapan penerimaan dan identifikasi para pengungsi di *hotspot* Yunani diantaranya :

a. Registrasi dan identifikasi
   Pada tahapan pertama para pengungsi yang hendak memperoleh perlindungan internasional akan melaksanakan proses pendaftaran dan nantinya akan dikategorikan berdasarkan kewarganegaraan (Papadopoulou et.al., n.d).
b. Debriefing
   Pada tahapan ini bersifat opsional yang akan dilaksanakan apabila para pengungsi memerlukan infomasi terkait proses penerimaan serta identifikasi di

Yunani (Papadopoulou et.al., n.d).

c. Sidik jari
   Pada tahapan setelah para pengungsi melaksanakan pendaftaran maka selanjutnya para pengungsi akan melaksanakan sidik jari serta adanya tahapan wawancara dan sesi foto (Papadopoulou et.al., n.d).
d. Pemeriksaan medis
   Tahapan terakhir yaitu pemeriksaan medis dimana setelah para pengungsi melaksanakan tahapan ini maka akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti : kelompok rentan, anak dibawah umur tanpa pendamping dan penyandang disabilitas (Leivaditi et al., 2020).

Seluruh tahapan-tahapan penerimaan pengungsi di *hotspot* Yunani dilaksanakan otoritas Yunani bersama dengan badan atau lembaga Uni Eropa, seperti the Greek Asylum Service, EASO, Frontex, Europol, the Greek Council for Refugees and ProAsyl lawyers and volunteers (Papadopoulou et al., n.d).

Terdapat dua hasil keputusan yang berbeda yang akan diterima oleh pengungsi setelah melalui tahapan-tahapan tersebut yaitu *relocation* atau *refoulement. Relocation* atau relokasi merupakan proses perpindahan para pengungsi setelah seluruh tahapan serta syarat untuk menerima perlindungan dan izin tinggal telah dipenuhi oleh pengungsi. Relokasi para pengungsi akan dilakukan dengan menyesuaikan bersama dengan negara anggota Eropa lainnya sehingga menimbulkan adanya rasa solidaritas bersama dari negara-negara Eropa (etiasvisa, n.d.). Sedangkan *refoulement* yang berarti pemulangan atau pengembalian dilaksanakan apabila para pengungsi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menerima perlindungan internasional ataupun relokasi dan mereka akan dipindahkan ke Turki sesuai perjanjian kerja sama *EU-Turkey Statement.* Pengembalian pengungsi di Yunani menunjukkan angka yang tinggi dimana hal ini biasanya disebabkan oleh para pengungsi yang tidak berdokumen lengkap dan legal (Tazzioli, 2016).

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya implementasi *hotspot* di Yunani dengan beberapa tahapan serta hasil keputusan tersebut telah mengambarkan bahwa kebijakan ini menjadi jalan keluar dari potensi munculnya permasalahan lain yang mengancam keamanan dari kedatangan pengungsi Eropa yang menjadi fokus utama Uni Eropa pada tahun tersebut. Uni Eropa memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya untuk menjaga keamanan regional di Eropa dimana organisasi ini tidak hanya mencetuskan kebijakan namun juga memberikan bantuan dana terhadap Yunani sebanyak €509 juta dalam periode waktu 2014- 2020 dan beberapa bantuan keuangan lainnya (European commission, 2016). Namun, beberapa bantuan yang dilaksanakan dan diberikan Uni Eropa tidak sepenuhnya dapat membantu kondisi krisis pengungsi di Yunani yang mana masih terdapat tantangan dalam penerapan *hotspot* di negara tersebut, diantaranya:

a. Biaya dan kondisi kehidupan para pengungsi
   Saat terjadinya krisis pengungsi di Yunani, negara tersebut juga mengalami krisis ekonomi sehingga beberapa kebutuhan dasar para pengungsi tidak dapat dipenuhi oleh otoritas Yunani. Selain itu, Yunani juga berada dalam sistem penerimaan pengungsi yang buruk serta kondisi pemerintahan yang jauh dari kata baik dimana Uni Eropa menyatakan bahwa Yunani sering kali tidak melaporkan hasil penggunaan dana yang diberikan oleh organisasi tersebut (Nadhifa & Fahadayna, 2020).
b. Perlakuan terhadap pengungsi
   Berdasarkan kesulitan biaya yang memengaruhi kondisi kehidupan para pengungsi juga menjadikan munculnya

perlakuan yang tidak baik dari Yunani sehingga menarik perhatian organisasi internasional seperti UNHCR. Kondisi perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh Yunani tersebut dinyatakan melanggar hak asasi manusia dari para pengungsi diantaranya: tindakan kekerasan, pengembalian, serta membatasi akses kebebasan (UNHCR, 2015).

c. Ketegangan antara masyarakat lokal dengan pengungsi
Kedatangan pengungsi di Yunani menunjukkan adanya dampak atau pengaruh khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Para pengungsi di Yunani sering kali dianggap membawa dampak negatif karena dianggap dapat meningkatkan angka pengangguran di Yunani dan sulitnya proses integrasi. Sehingga melalui kondisi tersebut justru menimbulkan ketegangan antara masyakat Yunani yang sulit menerima kehadiran para pengungsi di negaranya (Wike et al., 2016).

Berdasarkan beberapa tantangan yang dihadapi Yunani telah memperlihatkan bahwa negara tersebut tidak sepenuhnya sanggup untuk menjalankan beberapa upaya penanganan krisis pengungsi dengan mempergunakan kebijakan *hotspot* dari Uni Eropa. Kebijakan *hotspot* ini justru menyulitkan dan memberi beban yang besar bagi Yunani karena tujuan dari kebijakan tersebut yang digadang-gadang menjadi pelindung keamanan regional Eropa. Ketidaksiapan Yunani tentunya didasari oleh minimnya dana dan sistem penerimaan yang mana awalnya Yunani hanya diperuntukkan sebagai negara transit namun saat munculnya krisis justru menjadi negara yang harus menampung ribuan pengungsi di negaranya. Dengan adanya beberapa kondisi tantangan tersebut yang mana seharusnya menjadi tempat yang mengedepankan hak asasi para pengungsi justru menyebabkan munculnya pelanggaran hak asasi.

Namun, beberapa tantangan tersbeut justru berdasarkan pernyataan dari Aspasia Papadopoulou selaku Pejabat Advokasi Senior di *European Council on Refugees and Exiles* (ECRE) merupakan suatu hal yang menjadi konsekuensi dari Uni Eropa karena melimpahkan tanggung jawab ke tingkat nasional. Yunani sebagai negara anggota dari Uni Eropa tentunya akan menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya termasuk dalam mengimplementasi *hotspot*. Dalam hal ini, otoritas Yunani masih memiliki kedudukan tertinggi dalam menjalankan proses pelaksanaan yang tentunya tidak akan banyak merugikan negaranya.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan *hotspot* menjadi kebijakan yang berhasil yang mana pada tahun 2016, jumlah kedatangan pengungsi di Yunani telah mengalami penurunan dan dibarengi oleh tingginya jumlah pengembalian pengungsi di Yunani sehingga meminimalisir ancaman keamanan regional yang ditimbulkan dari kedatangan pengungsi. Namun di sisi lain kebijakan ini justru memicu adanya pelanggaran hak asasi manusia dari para pengungsi dan membuat kondisi pengungsi menjadi dalam bahaya

PENUTUP

Krisis pengungsi pada tahun 2015-2016 sangat memengaruhi kondisi negara-negara Eropa termasuk Yunani. Kedatangan pengungsi ini dianggap mendatangkan beberapa dampak atau ancaman yang dapat memengaruhi keamanan regional di Eropa. Sehingga, Uni Eropa sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Eropa mengupayakan beberapa kebijakan yang dapat menangani krisis pengungsi yang alami pada tahun tersebut. Kebijakan tersebut ialah kebijakan *hotspot* yang berfokus dinegara garis depan seperti Yunani dan menjadi tempat yang akan memfasilitasi registrasi dan identifikasi dari para pengungsi.

Yunani sebagai negara garis depan Eropa

menjadi negara yang menerima jumlah pengungsi terbanyak. Implementasi *hotspot* di Yunani selain karena jumlah pengungsi di Yunani yang cukup tinggi, pemilihan ini juga dikarenakan Uni Eropa yang berupaya untuk mencegah para pengungsi masuk ke negara-negara Eropa lainnya. Posisi Yunani menjadi tempat yang baik dalam implementasi *hotspot* karena letak geografis Yunani yang menjadi negara gerbang masuk pertama bagi para pengungsi. Sehingga kondisi keamanan regional Eropa akan terjaga dengan adanya wadah identifikasi pengungsi di Yunani.

Terdapat tahapan-tahapan yang diberlakukan di Yunani untuk mendeteksi maksud kedatangan para pengungsi, diantaranya: registrasi dan identifikasi, *debriefing* (opsional), sidik jari serta pemeriksaan medis (Papadopoulou et al., n.d). Dalam tahapan *hotspot* para pengungsi yang ditemukan tidak dengan persyaratan lengkap untuk tinggal dan menerima perlindungan di Eropa akan dikembalikan ke Turki sesuai isi dari *EU-Turkey Statement* yang sangat memengaruhi kebijakan *hotspot* di Yunani dan bagi para pengungsi yang memenuhi syarat maka akan dilakukan tahapan relokasi ke negara-negara Eropa lainnya.

Implementasi *hotspot* di Yunani tentunya mengalami kesulitan dan tantangan karena buruknya sistem penerimaan dan minimnya dana di Yunani dimana kesulitan tersebut berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia dari pengungsi yang dilakukan oleh otoritas Yunani sehingga menarik perhatian organisasi internasional yang bergerak dalam bidang hak asasi dan pengungsi.

Daftar Pustaka

Buku :

Williams, P. D. (Ed.). (2008). *Security studies: An introduction.* Routledge.

Jurnal:

Abikova, J., & Piotrowicz, W. (2021). Shaping the Balkan corridor: Development and changes in the migration route 2015–16. *International Migration, 59(5),* 248–265. https://doi.org/10.1111/IMIG.12828

Anagnostopoulos, D. C., Giannakopoulos, G., & Christodoulou, N. G. (2017). The synergy of the refugee crisis and the financial crisis in Greece: Impact on mental health. *International Journal of Social Psychiatry, 63(4),* 352–358. https://doi.org/10.1177/0020764017700444

Estevens, J. (2018). Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies. *Comparative migration studies, 6(1),* 1-21.

Herindrasti, Sinta. (2015). Krisis Pengungsi Eropa 2014-2015. *Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia 1–19*.

Lamb, I. A. (2016). The gates of Greece: refugees and policy choices. *Mediterranean Quarterly, 27(2),* 67-88.

Leivaditi, N., Papatzani, E., Ilias, A., & Petracou, E. (n.d.). *Refugee Protection Greece Country report Working Papers Global Migration: Consequences and Responses.* https://www.respondmigration.com/

Mentzelopoulou, M., & Luyten, K. (2018). Hotspots at EU external borders: State of play. *European Parliamentary Research Service, June, 1–7.* http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623563/EPRS_BRI(2018)623563_EN.pdf

Nadhifa, K., & Fahadayna, A. C. (2020). Sexual Gender-Based Violence in Greek Refugees Camp. *Transformasi Global, 7(2),* 176-200.

Papadopoulou, A., Maimone, E., Tsipoura, V., Drakopoulou, K. (n.d.) *The implementation of the hotspots in Italy and Greece.* https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/HOTSPOTS-Report-5.12.2016..pdf

Petersen, N. (2019). *The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study*. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-156344

Ridho, M., Yani, Y. M., & Sudirman, A. (2020). Analisis Konflik Arab Spring di Suriah The Analysis of Conflict Arab Spring in Syria. *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 12(1),* 113–122.

Satria Mulyadi, D., Raya Bandung Sumedang, J. K., Jatinangor, K., Sumedang, K., & Barat, J. (2020). Trend Kebijakan Pembangunan Pagar Pembatas Perbatasan di Negara-Negara Eropa Timur.

Global Political Studies Journal, 4. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i1

Skleparis, D. (2017). The Greek response to the migration challenge: 2015-2017. *KAS Katoptron*

Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016). Europeans fear wave of refugees will mean more terrorism, fewer jobs. *Pew Research Center, 11,* 2016.

Situs Resmi:

European Commission. (2016). *Progress report on the implementation of the hotspot approach in Greece.* Retrieved May 6, 2022, from https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcwedi1dcze/v=s7z/f=/com(2016)141_en.pdf

European Commission. (2020). *The European Union: what it is and what it does, Publications Office.* https://data.europa.eu/doi/10.2775/41083

European Union. (n.d). *Greece.* Retrieved April 24, 2022, from https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/greece_en

UNHCR. (1967). The 1951 Convention and its 1967 Protocol. *Unhcr, 16*

UNHCR. (2015). *New UNHCR report warns against returning asylum-seekers to Greece*. Retrieved July 9, 2022, from https://www.unhcr.org/news/briefing/2015/1/54cb698d9/new-unhcr-report-warns-against-returning-asylum-seekers-greece.html

UNCHR. (2016). *Monthly Data Update: June 2016 Refugees &Amp; Migrants Sea Arrivals In Europe. 2016 (June),* 1–7. https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/ 49921

UNHCR. (n.d.). Refugee Data Finder. *Refugee Statistics.*

Media Daring:

Clogg, R. Ralph Mowbray , Bowman, . John S. , Smith, . Catherine Delano , Danforth, . Loring and Haldon, . John Frederick (2022). Greece. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Greece

Danish Refugee Council. (2017). Fundamental rights and the EU hotspot approach. October, 35. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resou rces/Fundamental rights_web %281%29.pdf

Etiasvisa. (n.d.) Hotspot System: How Does It Work in EU's External Borders?. Retrieved May 23, 2022, from https://www.etiasvisa.com/etias-news/euhotspot-system

Gabel, M. J. (2022). European Union. Encyclopedia Britannica.https://www.britannica.com/topic/EuropeanUnion

Guérin, A. (2021). The European Approach to Hotspots in Greek Islands. Retrieved May 20, 2022, from https://www.law.ox.ac.uk/research-subjectgroups/centre-criminology/centrebordercriminologies/blog/2021/04/european-approach

Tazzioli, Martina. (2016). Greece's Camps, Europe's Hotspots. Oxford Law Faculty. Retrieved May 18, 2022, from https://www.law.ox.ac.uk/researchsubject-groups/centre-criminology/centrebordercriminologies/blog/2016/10/greece's-camp